

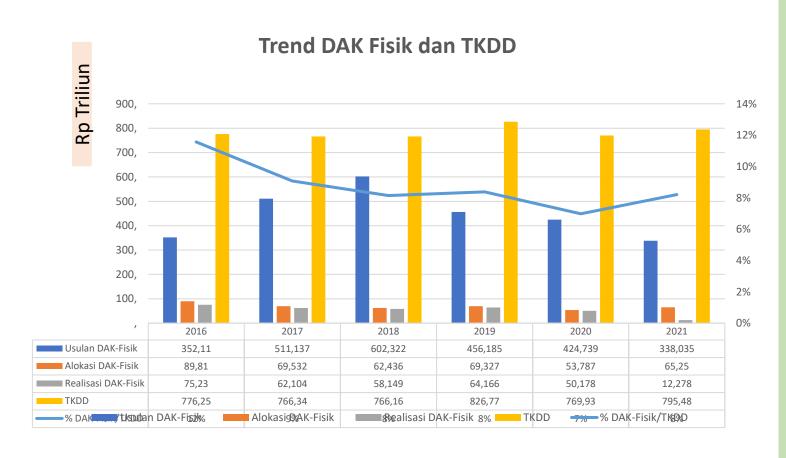


TANTANGAN DAK FISIK



Tantangan 1: ALOKASI TERBATAS





- Usulan DAK Fisik dari daerah masih sangat tinggi dibandingkan alokasinya (usulan 6 sd 9 kali lipat dari besaran alokasi), sehingga usulan daerah harus lebih rasional dan sesuai prioritas
- Fluktuasi alokasi DAK Fisik mengikuti ketersediaan pagu total TKDD yang tersedia setelah pemenuhan pendanaan TKDD yang bersifat mandatory seperti DAU, DBH, Otsus, Dana Desa, dan DAK Non Fisik.
- Rata-rata alokasi DAK Fisik hanya 8% dari total alokasi TKDD per tahun, sementara usulan daerah sangat besar.
- Penurunan terjadi tahun 2020 karena realokasi akibat adanya pandemi Covid-19.



Tantangan 2: LOKASI PRIORITAS DAK PENUGASAN BELUM FOKUS



	2018		2019		2020		2021					
Bidang DAK	Jml Daerah	% Daerah	Rata-Rata Alokasi (Miliar Rp)									
Bidang terkait langsung Pelayanan Dasar antara lain:												
Pendidikan	531	98,0%	17,2	533	98,3%	31,6	537	99,1%	35,8	536	98,9%	34,2
Kesehatan dan KB	540	99,6%	33,3	542	100,0%	36,7	542	100,0%	38,3	542	100,0%	38,3
Jalan	539	99,4%	33,8	536	98,9%	30,3	535	98,7%	29,8	525	96,9%	20,6
Air Minum	464	85,6%	4,5	483	89,1%	4,3	425	78,4%	7,7	477	88,0%	6,3
Sanitasi	372	68,6%	5,8	461	85,1%	4,3	477	88,0%	5,8	483	89,1%	4,1
Irigasi	435	80,3%	9,8	446	82,3%	6,7	415	76,6%	4,9	406	74,9%	7,4
Bidang terkait penugasan khusus dan kekhasan daerah antara lain:												
Pertanian	511	94,3%	3,3	525	96,9%	3,6	445	82,1%	3,4	357	65,9%	3,9
Kelautan dan Perikanan	419	77,3%	2,1	489	90,2%	1,9	477	88,0%	2,1	478	88,2%	2,1
Industri Kecil dan Menengah	103	19,0%	5,5	109	20,1%	5,0	106	19,6%	3,8	162	29,9%	4,6
Pariwisata	319	58,9%	2,0	351	64,8%	2,9	306	56,5%	3,3	108	19,9%	5,8
LH dan Kehutanan	257	47,4%	1,9	335	61,8%	1,6	175	32,3%	3,5	126	23,2%	5,6

- Alokasi DAK Reguler hampir merata ke seluruh daerah karena untuk pemenuhan layanan SPM
- Alokasi DAK Penugasan terdistribusi ke banyak daerah (hampir seluruh pemda). Perlu dilakukan penajaman fokus intervensi alokasi sehingga target ketuntasan sasaran prioritas dapat lebih terarah.



Tantangan 3: REALISASI TIDAK OPTIMAL





Bidang	Jumlah Menu TA 2021	Rata-Rata Penyerapan 2017 – 2019	
Pertanian	9	88.86%	
Irigasi	4	82,8%	
Jalan	6	89,9%	
Perkim	4	89,21%	
Pariwisata	5	80,91%	
Transportasi Perdesaan	5	82,57%	
Air Minum	12	87.4%	
Sanitasi	9	92.1%	
Transportasi Laut	1	-	
Kelautan dan Perikanan	11	83,45%	
Pendidikan	11	89,1%	
Kesehatan dan KB	24	85,17%	
LHK	5	77,4%	
IKM	2	83,3%	

REALISASI PENYALURAN DAN PENYERAPAN BELUM OPTIMAL

Alokasi Realisasi --%

- Kebijakan relaksasi penyaluran sebagai respon terhadap pandemi covid-19 berhasil meningkatkan penyaluran DAK Fisik TA 2020 menjadi 93,2%, sedikit lebih tinggi dari penyaluran tahun sebelumnya (92,5%).
- Beberapa penyebab tidak optimalnya realisasi penyaluran dan penyerapan DAK Fisik:
 - a. Kendala pengadaan barang/jasa
 - b. Keterlambatan proses administrasi belanja di daerah.
- Realisasi penyerapan sebagian besar bidang DAK Fisik kurang dari 90%, dan beberapa bidang kurang dari 85%.



Tantangan 4: Kesenjangan Penyediaan Infrastruktur di Daerah





Meski telah terjadi perbaikan, kualitas infrastruktur daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain.

Global Competitiveness Index- Infrastructure

Sub-Indeks Infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah

Sub- Indeks infrastruktur	2	018	2019		
Sub- Indeks Inhastruktur	Score	Peringkat	Score	Peringkat	
Keandalan pasokan air minum	60.7	75	62.5	74	
Konektivitas jalan	34.6	120	59.8	109	
Eksposur ke air minum tidak sehat (%pop)	82.5	92	65.5	98	
Kualitas jalan (0-100)	48.1	75	52.6	60	

Sumber: WEF Report 2018 dan 2019



Masih terjadi kesenjangan kualitas dan akses infrastruktur antardaerah



Akses Air Minum layak Akses Sanitasi layak Prov Bengkulu 44,99% Prov DKI Jakarta 99,80%

Prov Papua 21,04% Prov DI Yogyakarta 91,19% Sumber: BPS (2019)



Kemampuan APBD yang sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur



- Porsi belanja modal dari APBD baru sekitar 14,08%.
- Belanja modal dari APBD 2020 di wilayah Jawa sebesar 18,05% (terendah), sedangkan di Kalimantan sebesar 23,30% (tertinggi).



Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, maka sinergi pendanaan antara berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, DAK Fisik dan Non Fisik, APBD, Financing, serta kerjasama antar Daerah) perlu ditingkatkan

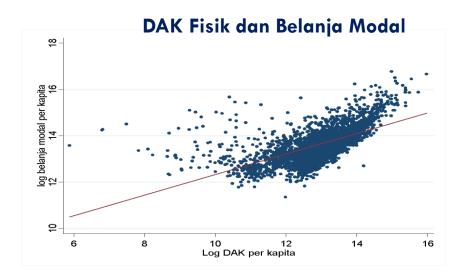


Tantangan 5: DAK Fisik menjadi komponen utama Belanja Modal dalam APBD



- DAK seharusnya menjadi **penunjang**, namun menjadi **sumber utama** belanja modal
- Sebagian besar DAK Fisik justru untuk **kegiatan pembangunan rutin** (pemenuhan SPM), yang idealnya dipenuhi melalui penerimaan umum APBD.
- Belum terintegrasi/kurang bersinergi dengan belanja lainnya, seperti DAK Non Fisik, Hibah Daerah, Dekon/TP, atau pendanaan lain dari pinjaman /Hibah LN.





Korelasi positif antara DAK per kapita dengan belanja modal per kapita.

- Mengindikasikan Pemerintah Daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama belanja modal.
- Terjadi crowding out, padahal DAK pada esensinya adalah skema penunjang.



Tantangan 6: PENYALAHGUNAAN DAK FISIK



- Masih terjadi beberapa kasus penyelewenagan yang terkait dengan DAK Fisik, yang ditangani oleh apparat penegak hukum
- Kasus terjadi di Pusat, biasanya yang terkait dengan pengalokasian dan atau janji-janji untuk mengawal alokasi DAK Fisik
- Kasus di Daerah biasanya terjadi dalam proses pengadaan DAK Fisik, yang mengkaitkan dengan pengaturan pemenang tender serta pemberian hadiah kepada Bupati atau pejabat Pemda



Kendala Pelaksanaan DAK Fisik

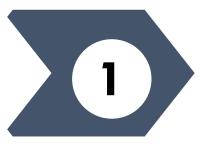


- 1. Penyesuaian kodefikasi DAK Fisik pada SIPD, \rightarrow perlu penyesuaian nomenklatur dan perubahan APBD
- 2. Penyesuaian aplikasi SIPD terkait program kegiatan dan sub kegiatan tidak terkoneksi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sehingga harus diinput manual dan lebih lambat.
- 3. Keterlambatan proses PBJ:
 - Menunggu penetapan DPA/Revisi DPA
 - Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan
 - Jenis barang yang akan dibeli tidak muncul/terlambat muncul dalam e-katalog
- 4. Reviu APIP atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output sebagai syarat penyaluran. → harus melihat kesesuaian: Daftar kontrak kegiatan, Titik koordinat pada foto, Daftar BAST, Nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan, Jumlah sisa di RKUD dan penggunaan sisa
- 5. Keterlambatan Jukop oleh beberapa K/L
- 6. Kendala pelaksanaan akibat pembatasan kegiatan karena pandemic Covid-19
- 7. Realisasi penyerapan belum menjadi IKU kepala SKPD



UPAYA PERCEPATAN PENYALURAN DAK FISIK TA 2021 OLEH DJPK





Percepatan proses PBJ tidak perlu menungga DPA ditetapkan):

Pasal 7 ayat (2) Perpres 123/2020:

"Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh K/L, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa"



Seharusnya Reviu APIP tidak menjadi kendala, karena untuk menjaga governance.

Kendala lebih pada keterbatasan kapasitas APIP, upaya yang telah dilakukan:.

- Menerbitkan Perdirjen PK Nomor 3 Tahun 2020 tetang pedoman reviu APIP
- Bimtek APIP
- Bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan quality control atas pelaksanaan reviu APIP



Kendala pelaksanaan akibat pembatasan kegiatan:

Perpanjangan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran DAK

Fisik: Dari 21 Juli menjadi 31 Agustus, diatur dalam KMK No. 13/MK.07/2021



Keterlambatan Jukop oleh beberapa K/L:

- Percepatan Penerbitan Juknis (paling lambat Desember)
- mendorong kecepatan penetapan Jukop (maksimal minggu II Januari)
- Dalam hal tidak ada perubahan menu dimungkinkan jukop berlaku lebih dari 1 tahun



KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2022



RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

RUANG LINGKUP

- dialokasikan kepada daerah tertentu
- membantu mendanai kegiatan khusus berupa penyediaan pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar-Daerah
- kegiatan merupakan urusan kewenangan daerah

FUNGSI

- Mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur & layanan publik antar Daerah;
- Pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik di daerah;
- Peningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik.

PERKEMBANGAN **MEKANISME PENGALOKASIAN**

2003-2015

Alokasi dihitung dengan menggunakan Formula

2016-Sekarang

Alokasi Didasarkan pada Usulan Kebutuhan Daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional

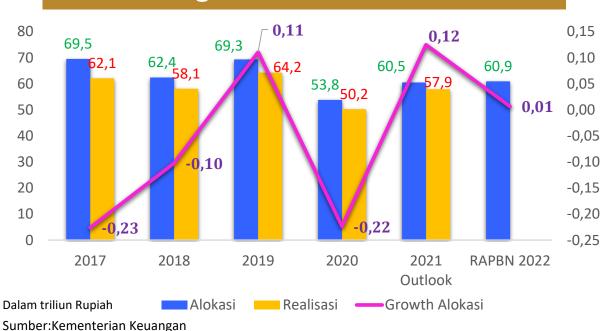
untuk menghindari mismatch antara alokasi dengan kebutuhan daerah



DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TA 2022

Tujuan: Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan publik antar-daerah

Perkembangan DAK Fisik TA 2017-2022



Mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis **Tematik:**

- Pariwisata dan IKM;
- Food Estate dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani; dan
- <u>Konektivitas</u> Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

KEBIJAKAN TA 2022



Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang **berdampak langsung** pada pertumbuhan ekonomi sebagai **respon dampak pandemi COVID-19.**



Melanjutkan penguatan atas **pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah.**



Meningkatkan **akuntabilitas pengelolaan** DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan **kualitas pengawasan**.



Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional.



Memperkuat **sinergi** pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh **sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L)**.



Mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan DAK Fisik Perdagangan.



Berdasarkan **usulan** daerah dan/atau aspirasi anggota DPR dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, **kapasitas fiskal** dan **kinerja daerah**, **serta tata kelola keuangan yang baik**



JENIS, BIDANG DAN TEMA DAK FISIK TA 2022

DAK FISIK Reguler

Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan **SDM Berdaya Saing** (termasuk penanganan stunting)





Pendidikan

Kesehatan & KB

Infrastruktur Dasar





Air Minum





Sanitasi

Perumahan &Pemukiman

DAK FISIK Reguler TA 2021

5 BIDANG

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan & KB
- 3. Jalan
- 4. Transportasi Perdesaan*
- 5. Transportasi Laut*
- *) difokuskan untuk daerah berciri afirmasi

DAK FISIK Penugasan

12 BIDANG (2 bidang baru: Perdagangan dan UMKM)

Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah













Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani















Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua













BIDANG BARU DAK FISIK TA 2022

DAK FISIK Penugasan TA 2021 11 BIDANG

Terdapat 4 tematik sebagai berikut:

- 1. Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- 2. Tema Penanggulangan Kemiskinan
- 3. Tema Ketahanan Pangan
- 4. Tema Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan

*Kebijakan DAK Fisik tetap mendukung adanya kebijakan afirmasi antara lain di bidang Pendidikan (asrama siswa), Kesehatan (puskesmas di DTPK) dan Perumahan dan Permukiman (pembangunan rumah khusus)



POSTUR DAK FISIK TA 2022 PER BIDANG

(dalam miliar Rupiah)

No	Uraian	2021 Outlook*	2022 RAPBN	2022
1	Pendidikan	16.542,6	18.348,5	18.348,5
2	Kesehatan dan KB	17.891,7	15.774,3	15.774,3
3	Jalan	9.567,8	11.500,0	12.165,2
4	Air Minum	2.772,9	3.000	3.000
5	Sanitasi	1.955,6	2.000	2.000
6	Perumahan dan Permukiman	947,3	1.000	1.000
7	Irigasi	2.520,5	1.500	1.500
8	Pertanian	1.306,8	2.200,0	2.200,0
9	Kelautan dan Perikanan	917,5	1.134,9	1.134,9
10	Industri Kecil dan Menengah	664,9	750,0	753,2
11	Pariwisata	521,8	709,3	431,9
12	Transportasi Perairan	545,0	937,0	530,7
13	Transportasi Perdesaan	1.154,8	1.000	1.000
14	Lingkungan Hidup	295,5	350	350
15	Kehutanan	251,2	350	350
16	Perdagangan		200	200
17	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		120,0	135,3
	Total	57.855,9	60.874,0	60.874,0

- Pagu DAK Fisik 2022 (Panja TKDD) menyesuaikan hasil sinkronisasi-harmonisasi.
- Pagu DAK Fisik pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Rp34,1 T) sudah menjadi bagian kebijakan mandatory spending Pendidikan dan Kesehatan (56%)
- Bidang DAK Fisik lainnya sebesar Rp26,8 T (44%) dibagi pada berbagai bidang sesuai prioritas RKP dan besarnya kebutuhan

^{*}Outlook berdasarkan realisasi kontrak 31 Agustus 2021



MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2022



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK

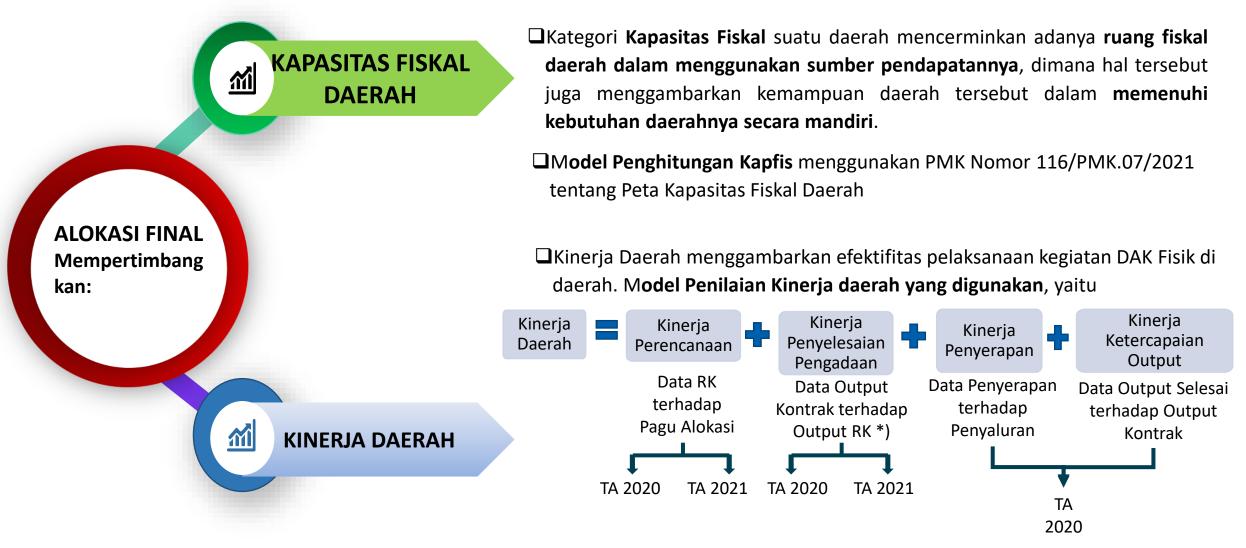
PENGALOKASIAN memperhatikan

- Hasil penilaian teknis oleh kementerian/Lembaga/Bappenas sector atas usulan daerah dan usulan DPR
- Kinerja DAK Fisik (serapan dana dan capaian output) TA sebelumnya → Kinerja Merah, Kuning Hijau.
- Reward and punishment berdasar kinerja DAK Fisik TA sebelumnya

 Reward untuk daerah berkinerja Hijau,
 Punishment untuk daerah kinerja Merah
- Kapasitas Fiskal masing-masing daerah → sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah
- Alokasi minimal → agar alokasi per daerah signifikan.



Indikator Perhitungan Alokasi DAK Fisik TA 2022 Setelah Tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi



^{*)} Kinerja 2:

> Bidang Kesehatan & Pendidikan (tidak termasuk subbidang perpustakaan) menggunakan data TA 2020 & TA 2021

> sedangkan bidang/subbidang selainnya hanya menggunakan data TA 2021 saja



PERPRES JUKNIS DAK FISIK TA 2022



Pokok-pokok Pengaturan

- 1. Ketentuan mengenai Jenis, Bidang, dan Tematik DAK Fisik.
- 2. Pengelolaan DAK Fisik di Daerah, meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi.
- 3. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat.
- 4. Ketentuan lain-lain
 - Keadaan Force Majeur
 - Kondisi Pengurangan Pagu Alokasi DAK Fisik dalam APBN.
- 5. Lampiran I yang berisi petunjuk teknis DAK Fisik per Bidang/Subbidang meliputi:
 - Arah Kebijakan
 - Tujuan dan Sasaran
 - Ruang Lingkup Kegiatan (Menu dan Kegiatan DAK Fisik serta Lokasi Prioritas)
 - Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan
 - Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
- 6. Lampiran II yang berisi Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik.



LAMPIRAN



TIMELINE PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2022

21 Mei – 30 Juni 2021



Pengusulan Kegiatan DAK Fisik

Pemda menyampaikan usulan melalui aplikasi KRISNA; 1 - 26 Juli 2021



Penilaian Awal Usulan

Penilaian awal oleh K/L teknis dan/atau Bappenas sektor atas kelayakan teknis berdasar kriteria teknis yg telah disepakati dari seluruh usulan yang masuk 2 – 30 Agustus 2021



Sinkronisasi & Harmonisasi

Konfirmasi hasil penilaian awal bersama Daerah untuk memastikan kelayakan teknis dan pemenuhan kesiapan pelaksanaan kegiatan 1 – 15 September 2021



Penghitungan Alokasi

Penghitungan alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi, dengan mempertimbangan kapasitas fiskal dan kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya 20 - 30 September 2021



Persetujuan RAPBN 2022

Pemerintah melakukan pembahasan RAPBN bersama DPR, untuk selanjutnya dilakukan persetujuan oleh DPR. Rincian alokasi per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Nov - Des 2021



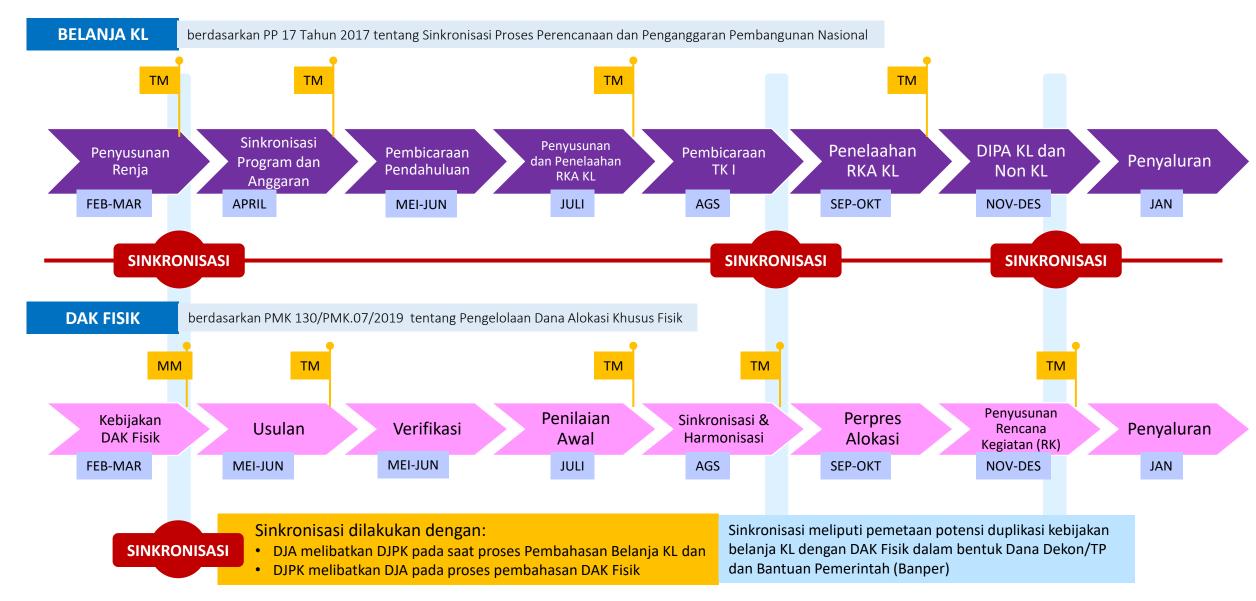
Penyusunan Rencana Kegiatan

Pemda menyusun Rencana Kegiatan (RK) sesuai alokasi yang telah ditetapkan (Perpres) sebagai dasar pelaksanaan DAK Fisik di tahun 2022

Pemerintah menerima usulan aspirasi dari DPR RI melalui Banggar, untuk selanjutnya dilakukan penginputan ke dalam aplikasi KRISNA, penilaian, sinkronisasi-harmonisasi, dan penghitungan alokasi oleh Pemerintah



SINKRONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK





TARGET OUTPUT DAK FISIK TA 2022

Target Output DAK Fisik 2022 mengacu pada Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022, antara lain :



PENDIDIKAN

- Satuan Pendidikan yang Direvitalisasi 47.890 Unit
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan 42 Unit
- Perluasan/Renovasi Gedung Layanan 24 Unit



KESEHATAN DAN KB

- Peningkatan ketersediaan dan kualitas Sarana dan Prasarana Alat (SPA) di 3.439 Puskesmas
- Peningkatan status gizi bagi 410.270 ibu hamil dan 756.714 balita kurus
- Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) 13 Unit
- Rehab Gudang Alokon 42 Unit
- Pembangunan/Alih Fungsi/Rehabilitasi Balai Penyuluh 167 Unit



UMKM

- Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dibangun 14 PLUT
- Jumlah PLUT direvitalisasi 7 PLUT



JALAN

- Penanganan Jalan 15.119 km
- Penanganan Jembatan 7.118 meter



LINGKUNGAN HIDUP

- Sarpras Pengelolaan Sampah dan Pendukungnya 1.422 Unit
- Pengadaan Unit Pemantauan Kualitas Air 114 Unit
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Merkuri 37 Paket



PARIWISATA

- Ketuntasan Pembangunan Daya Tarik Wisata 81 DTW



PERDAGANGAN

- Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata 1 Unit
- Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata Bali 1 Unit
- Pembangunan Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG) 1 Unit



KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 66 Pelabuhan
- Pembangunan/Rehabilitasi UPTD 140 Balai Benih
- Pembangunan Sarpras Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
 173 Kab/Kota dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil 184 Kab/Kota

SKEMA PERHITUNGAN

Alokasi Teknis

Usulan daerah dengan status *approve* pada fase Sinkron dilakukan **penyesuaian dengan memperhatikan Pagu Bidang/Subbidang**



Intervensi Kapfis dan Kinerja *

Terhadap hasil sinkron yang telah disesuaikan dengan pagu selanjutnya dilakukan **intervensi Kapfis dan Kinerja** dengan 2 skema perhitungan



Penyesuaian Batasan Alokasi

☐ Terhadap hasil intervensi Kapfis dan Kinerja selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan batasan alokasi minimal per daerah.



Pembulatan

Terhadap hasil
penyesuaian batasan
alokasi selanjutnya
dilakukan pembulatan
alokasi per daerah dalam
satuan ribuan rupiah

Kumulatif Bertahap

Indikator Kapfis dan Kinerja diperhitungkan secara bertahap untuk selanjutnya diakumulasikan dalam perhitungan alokasi

DAK FISIK REGULER

Indeks Gabungan

Indikator Kapfis dan Kinerja
dihitung secara komposit
menjadi suatu indeks baru
untuk dilakukan
pengelompokan daerah
sebagai dasar intervensi
perhitungan alokasi

DAK FISIK PENUGASAN

Keterangan *):

Untuk DAK yang menggunakan IT, penerapan Kapfis & Kinerja dilakukan

KUMULATIF BERTAHAP (PENGALOKASIAN DAK FISIK REGULER) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **ALOKASI PENAMBAHAN PEMOTONGAN** a. KAPASITAS **Pasca Kafis PENYESUAIAN 2** Dari nilai alokasi teknis **FISKAL** Menyesuaikan ALOKASI PENYESUAIAN 1 Sangat Rendah dengan memperhatikan nilai batasan Sangat Tinggi alokasi minimal (jika ada): 10% **PROPORSIONAL** Rendah **STOCK PROGRAM *** • Pagu Minimal sebesar Rp1 M (MAX 10%) Tinggi Hasil sinkron Daerah A Rp1,3 5% M, berdasarkan penyesuaian Sedang alokasi kafis/kinerja **menjadi Rp926,3 juta DIKEMBALIKAN ALOKASI SELISIH PROPORSIONAL** → Maka **alokasi** yang **PEMOTONGAN PEMOTONGAN TEKNIS** ditetapkan: Rp1 M **ALOKASI PEMOTONGAN PENAMBAHAN** Dari nilai alokasi pasca **PENYESUAIAN 1** kafis Hijau **ALOKASI FINAL** Merah **PROPORSIONAL** SISA STOCK PROGRAM b. KINERJA 5% Kuning (MAX 10% ALOKASI PEMBULATAN ALOKASI **PASCA KAPFIS)** PENYESUAIAN 2 Kuning+ **DIKEMBALIKAN SELISIH PROPORSIONAL PEMOTONGAN PEMOTONGAN** www.kemenkeu.go.id 26

26



INDEKS GABUNGAN (PENGALOKASIAN DAK FISIK PENUGASAN)

KOMPOSIT KAPASITAS FISKAL & KINERJA



PENYESUAIAN 2

Menyesuaikan ALOKASI PENYESUAIAN 1 dengan memperhatikan nilai batasan alokasi maksimal dan alokasi minimal (jika ada):

- Pagu Minimal sebesar Rp1 M
- Hasil sinkron Daerah A Rp1,3 M, berdasarkan penyesuaian alokasi kafis/kinerja menjadi Rp926,3 juta
 - → Maka alokasi yang ditetapkan: Rp1 M

ALOKASI FINAL

PEMBULATAN ALOKASI PENYESUAIAN 2



Hal

Pokok-pokok Perubahan

Rancangan Juknis 2022

Juknis 2021

Penambahan Bidang		Bidang Pasar danBidang UMKM
Perubahan Tematik	 Penurunan Kematian Ibu dan Stunting; Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak; Ketahanan Pangan; dan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan 	 Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Perubahan Lampiran Juknis	Tidak diatur	Perubahan lampiran dapat dilakuakn dengan peraturan menteri
Perubahan Petunjuk Operasional	paling lambat 2 (dua) bulan sejak petunjuk operasional ditetapkan.	paling lambat 2 (dua) bulan sejak petunjuk teknis ditetapkan.
Kelengkapan dokumen usulan revisi RK karena bencana alam	Tidak ada	 Surat/Keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana; Surat Pernyataan Hasil Verifikasi Bencana dari OPD yang berwenang; SPTJM dan Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Kegiatan; Detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan; dan Rancangan teknis kegiatan



Pokok-pokok Perubahan

Hal	Juknis 2021	Rancangan Juknis 2022
Penambahan nilai approve atau penambahan usulan		 K/L dimungkinkan menambahkan nilai appriove dari stock program dari usulan dg status disscuss atau usulan baru berdasarkan pertimbangan teknis, dalam hal alokasi lebih besar dari nilai sinkronisasi dan harmonisasi

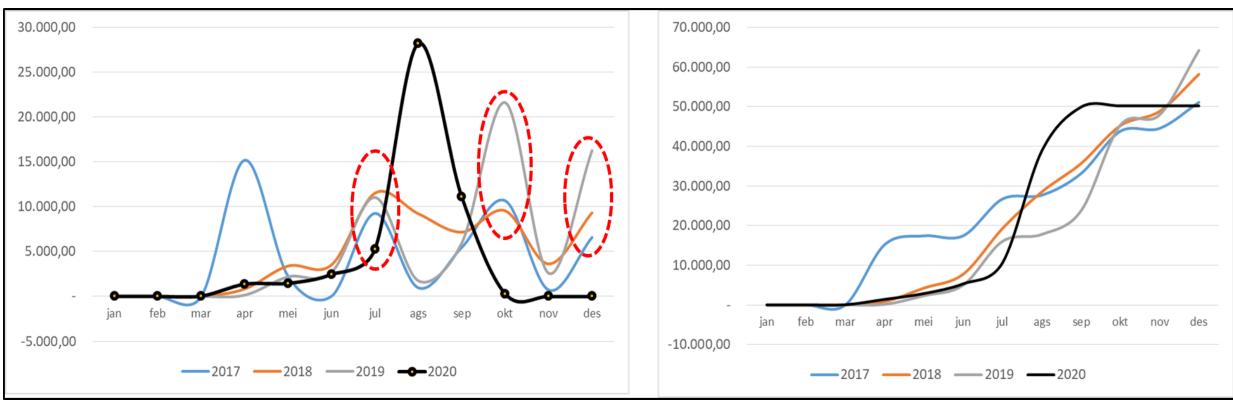


KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK

POLA PENYALURAN DAK FISIK NASIONAL

PENYALURAN PER BULAN 2017 - 2020

PENYALURAN AKUMULATIF PER BULAN 2017 - 2020



- rata-rata penyaluran di atas 93% dan penyaluran di TA 2020 paling tinggi dibandingkan dengan TA sebelumnya.
- Trend penyaluran pada bulan Juli, Oktober dan Desember
- Pola penyaluran di 2020 berbeda dengan TA sebelumnya, dampak dari relaksasi kebijakan
- DAK Fisik 2020 terakhir disalurkan pada bulan September 2020. Okt s.d. Des tidak ada penyaluran DF.

Sumber : Dit. PA, DJPb



PENYALURAN DAK FISIK

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan PMK No. 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DAK Fisik

Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

Penyaluran DAK Fisik dilakukan **per jenis**, dengan ketentuan:

Per Bidang untuk bidang DAK Fisik **yang tidak memiliki** Subbidang

Per Subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki Subbidang

Mekanisme Penyaluran DAK Fisik

Sekaligus

Dilakukan untuk Bidang dengan pagu alokasi dibawah Rp1Miliar

Bertahap

Dilakukan untuk Bidang/Subbidang dengan pagu alokasi diatas Rp1Miliar kecuali untuk kegiatan yang direkomendasikan K/L dilakukan pembayaran secara sekaligus

Campuran

Dilakukan untuk Bidang/Subbidang yang sebagian kegiatannya dilakukan pembayaran secara sekaligus/ bertahap



MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK: SEKALIGUS

- 1. Alokasi Bidang ≤ 1 Miliar
- 2.Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian *output* kegiatan DAK Fisik
- 3.Rentang waktu penyaluran : April Juli
- 4. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli
- 5. Dokumen Persyaratan penyaluran :
 - Perda APBD tahun anggaran berjalan;
 - Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direviu APIP; dan
 - Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis
 - Daftar kontrak Kegiatan.
- 6.Daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan berifat final
- 7.Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan **November** tahun anggaran berjalan



MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK: BERTAHAP

Penyaluran:

paling cepat **Feb** – paling lambat **Juli**

Penyampaian Persyaratan: Paling Lambat 21 Juli

Persyaratan antara lain Daftar Kontrak Kegiatan



45% dari Pagu Alokasi

TAHAP II

Penyaluran
paling cepat April – paling lambat Okt

Penyampaian Persyaratan Paling Lambat 21 Oktober

Persyaratan antara lain
laporan realisasi penyerapan dana paling
sedikit 75% dari dan capaian output
kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah
direviu APIP

Penyaluran paling cepat Sep – paling lambat Des

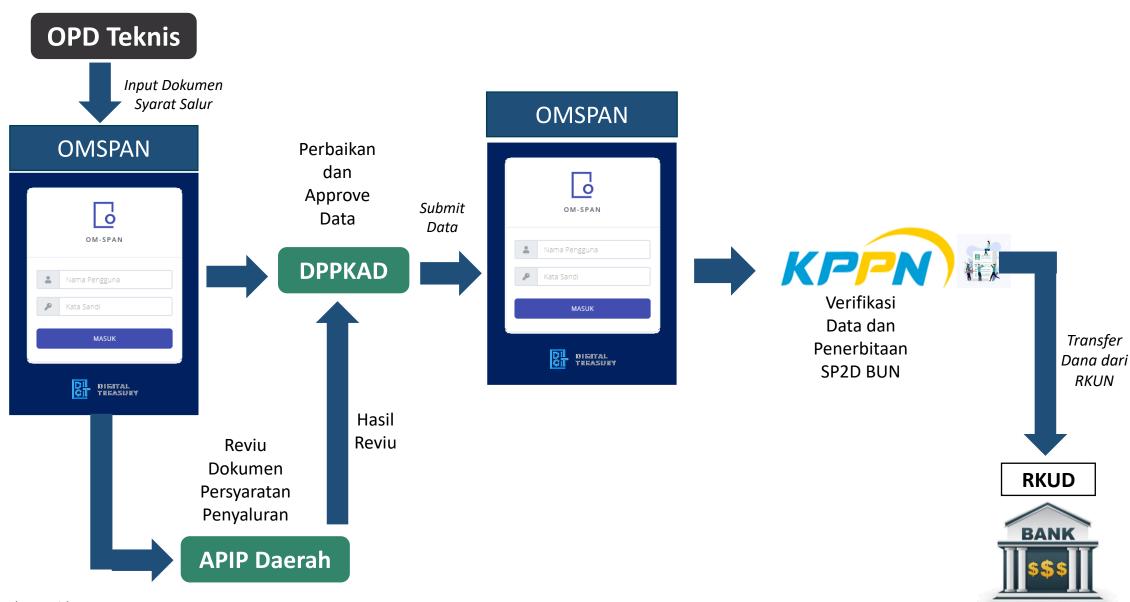
Penyampaian Persyaratan Paling lambat 15 Des

Persyaratan antara lain
laporan realisasi penyerapan dana
paling sedikit 90% dan capaian
output paling sedikit 70% yang telah
direviu APIP.





ALUR PENYALURAN DAK FISIK





PENGELOLAAN SISA DAK FISIK

PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

Mengatur penggunaan sisa DAK Fisik s.d TA 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran (output) kegiatannya sudah tercapai dan yang belum tercapai.

